

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang fungsinya menyerap dan menyalurkan dana (*financial intermediary*) dari dan untuk masyarakat. Definisi perbankan tertuang dalam peraturan perbankan UU No. 10 Tahun 1998 bahwa bank merupakan lembaga atau badan usaha yang menyerap dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan disalurkan kepada masyarakat berupa kredit atau bentuk lainnya yang bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Dari definisi tersebut, peran perbankan bertindak selaku penyambung antara kelompok yang mempunyai modal atau dana dengan kelompok yang kekurangan dana (modal), atau dapat dikatakan bahwa peran perbankan selaku lembaga intermediasi yang perannya sebagai penyerap dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*),²

Perbankan di Indonesia menganut *dual-banking system* yaitu perbankan yang menjalankan dua sistem dalam operasionalnya yang dikenal dengan sebutan bank konvensional dan syariah, kedua sistem tersebut berjalan secara bersamaan dan diatur dalam berbagai regulasi perundang-undangan yang berlaku.³ Sistem bunga (*interest*) digunakan oleh bank konvensional dan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*) dipergunakan oleh bank syariah.⁴ Sistem bunga diatur dalam UU No. 14 Tahun 1967 pasal 13 huruf c mengenai pokok-pokok perbankan yang berbunyi:⁵

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, mana pihak peminjam berkewajiban melunasi

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 13

² Trisadini dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 33.

⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 64

⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 88-89

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”

Adapun sistem bagi hasil diterapkan setelah ditetapkannya UU. No 7 Tahun 1992 dan mengalami perubahan dengan terbitnya UU No. 10 tahun 1998 mengenai perbankan, serta lebih spesifik mengenai perbankan syariah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008. Pengertian syariah diuraikan dalam Pasal 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:⁶

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”

Bank syari’ah dikembangkan sebagai perusahaan komersil yang dalam menjalankan bisnisnya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tujuan ekonomi secara Islami pada bank syariah tidak hanya terfokus pada sisi komersialitas semata yang tergambar pada pencapaian *profit* yang maksimal, tetapi bank syariah mempunyai tanggung jawab sosial untuk berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.⁷ Perbedaan mendasar antara dua sistem perbankan tersebut terletak pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menjalankan bisnisnya masing-masing. Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah menurut Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio sebagaimana pada table 1 di bawah ini:⁸

Tabel 1.
Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Bank Syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil.	Bank Konvensional mendasarkan perhitungan dengan bunga.
2.	Orientasi bank syariah yaitu	Orientasi bank konvensional

⁶ Sofyan Safri H., et. al, “Akuntansi Perbankan Syariah”, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 4

⁷ Khaerul Umam, “Manajemen Perbankan Syariah”, (Bandung: Pustaka setia, 2013), 16

⁸ Trisadini & Abd. Shomad, “Hukum Perbankan”, 7-8.

	keuntungan (<i>profit</i>) dan <i>al-Falah oriented</i> .	semata-mata <i>profit oriented</i> .
3.	Jalinan antara bank syariah dengan para nasabah bentuknya bersifat hubungan kemitraan.	Jalinan antara bank konvensional dengan para nasabah bentuknya bersifat debitur dan kreditur.
4.	Bank syariah meletakkan penggunaan dana secara riil (<i>user of real funds</i>).	Bank konvensional meletakkan penggunaan dana sebagai <i>creator of money supply</i> .
5.	Investasi yang dilakukan bank syariah hanya dalam bidang yang halal saja.	Investasi yang dilakukan bank konvensional tidak melihat aspek halal dan haram.
6.	Bank syariah dalam melakukan operasionalnya baik dalam penyerapan dan penyaluran dana harus sesuai dengan arahan DPS (Dewan Pengawas Syariah)	

Perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa di perbankan syariah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan sebagai pengawas dan pengevaluasi dari transaksi-transaksi (akad) yang dilakukan oleh manajemen bank tersebut. Sejak dioperasikannya bank syariah di Indonesia tahun 1992, tercatat hingga tahun 2017 sekarang sudah terdaftar ada 13 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

Tabel 2.
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia

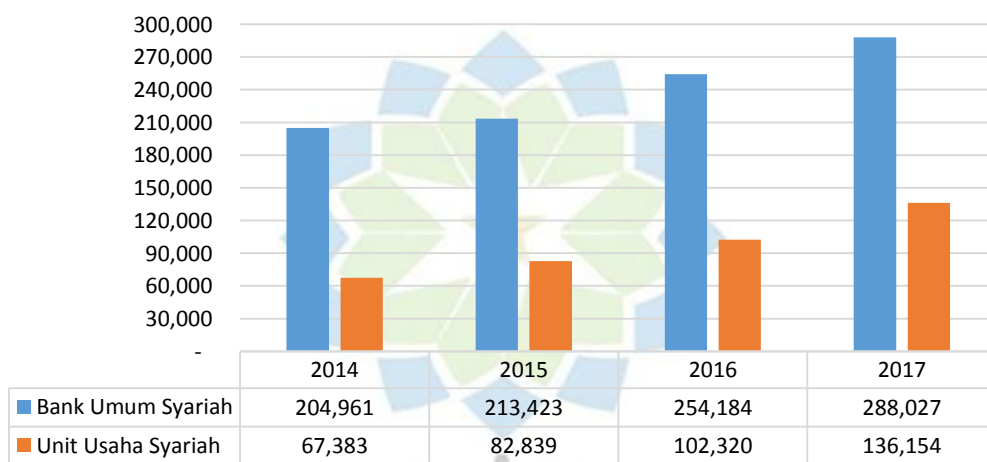
Kelompok Bank	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah	11	11	11	11	12	12	13	13
Unit Usaha Syariah	23	24	24	23	22	22	21	21
Jumlah BPRS	150	155	158	163	163	163	166	167
TOTAL	184	190	193	197	197	197	200	201

Sumber: SPS OJK 2017

Terjadinya perkembangan bank syariah tidak terlepas dari inisiatif bank konvensional dalam mengembangkan bisnisnya, hal itu terbukti dengan munculnya nama-nama bank konvensional yang beratribut syariah. Inisiatif ini didorong dengan adanya respon positif dari masyarakat tentang bank syariah, sehingga sampai dengan tahun 2017 ini terdaftar 13 Bank Umum Syariah di Indonesia. Perkembangan kuantitas bank umum syariah tidak hanya dari sisi jumlah bank-nya saja, melainkan terjadi pula pada sisi peningkatan aset yang dicapai oleh bank umum syariah. Sampai tahun 2017 aset bank syariah tercatat

sebesar Rp. 288,027 triliun atau sekitar 67.90% dari total aset perbankan syariah secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 424,181 triliun.⁹ Kalau dibandingkan dengan aset bank syariah yang lain seperti aset unit usaha syariah (UUS) sebesar Rp. 136,154 triliun atau sekitar 32.10% dari total aktiva seluruh perbankan syariah, sehingga penyumbang tertinggi dalam peningkatan aktiva Perbankan Syariah yaitu bank umum syariah.

Grafik 1
Perkembangan Aset Perbankan Syariah
Tahun 2014 s.d. 2017



Peningkatan aset yang terjadi pada bank umum syariah tidak terlepas dari dilakukannya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada September 2016. Aset bank Aceh Syariah mencapai Rp. 18,95 triliun sekitar 7,46% dari total aset bank umum syariah, atau sekitar 5,18% dari total aset perbankan syariah pada 2016. Aktiva perbankan syariah di Indonesia dikuasai oleh tiga bank terbesar, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah, aset ketiga BUS tersebut pada tahun 2017 mencapai 64.14% dari total aset bank umum syariah atau sebesar 43.55% dari total aset perbankan syariah secara keseluruhan.

Dari prosentase tersebut menunjukkan bahwa baru tiga bank umum syariah (BUS) yang sudah bisa dikatakan siap berkompetisi positif di dunia perbankan syariah Indonesia. Adapun bank umum syariah yang lain belum mampu

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah tahun 2017", (Jakarta: OJK, 2018), 4.

menyetarakan posisinya dengan dua bank tersebut. Hal ini menjadi indikasi kenapa perbankan berbasis syariah masih dibawah bayang-bayang perbankan konvensional, padahal tujuan dikembangkannya perbankan syariah di Indonesia yaitu untuk menciptakan perbankan yang mampu bersaing, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui pembiayaan dan transaksi berbasis bagi hasil (*loss and profit sharing*) dalam asas keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.¹⁰ Sampai tahun 2016 *share total* aset perbankan berbasis syariah hanya menembus sekitar 5.73% dari keseluruhan aktiva perbankan secara nasional masih jauh dari rencana OJK bahwa *share total* bank syariah setidaknya mencapai 10% dari total aset perbankan nasional.

Kondisi financial bank umum syariah sebagaimana yang diinformasikan oleh berbagai entitas sangat bervariasi, setiap bank berupaya untuk memperoleh hasil maksimal sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh manajemen masing-masing entitas. Pada kenyataannya bank umum syariah selain harus “berkompetisi” antar sesama bank syariah, lembaga tersebut juga dihadapkan pada persaingan dengan bank konvensional yang secara lembaga telah mapan di atas bank yang berasaskan syariah. Rasio keuangan bank berbasis syariah sepanjang periode 2017 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2017

Bank Umum Syariah	CAR %	ROA %	ROE %	NPF %	FDR %	BOPO %	Aset (Rp Miliar)
PT. Bank Muamalat Indonesia	13.62	0.11	0.87	4.43	84.41	97.68	61.696
PT. Bank Syariah Mandiri	15.89	0.59	5.71	4.53	77.66	94.44	87.939
PT. Bank Mega Syariah	22.19	1.56	6.75	2.95	91.05	89.16	7.034
PT. Bank BRISyariah	20.29	0.51	4.10	6.43	71.87	95.24	31.543
PT. Bank Syariah Bukopin	19.20	0.02	0.20	7.85	82.44	99.20	7.166

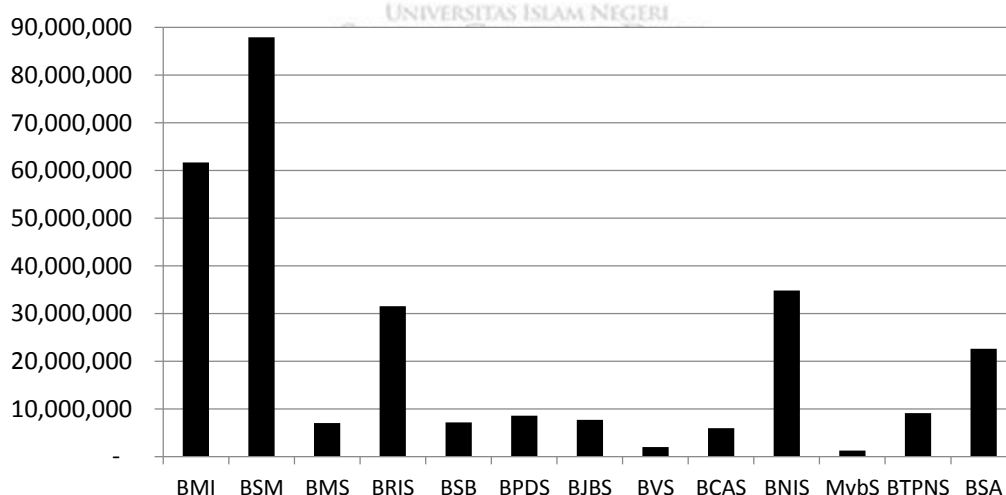
¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, “Perbankan Syariah di Indonesia”, 33.

PT. Bank Panin Dubai Syariah	11.51	(10.77)	(94.01)	12.52	86.95	217.40	8.629
PT. Bank Jabar Banten Syariah	16.25	(5.69)	(58.64)	22.04	91.03	134.63	7.713
PT. Bank Victoria Syariah	19.29	0.36	2.01	4.59	83.59	96.02	2.003
PT. BCA Syariah	29.39	1.17	4.28	0.32	88.49	87.20	5.961
PT. Bank BNI Syariah	20.14	1.31	11.42	2.89	80.21	87.62	34.822
PT. Maybank Syariah Indonesia	75.83	5.50	(1.78)	-	85.94	83.36	1.275
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	28.91	11.19	36.50	1.67	92.47	68.81	9.156
PT. Bank Syariah Aceh	21.50	2.51	23.11	1.38	69.44	78.00	22.612

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Data tersebut menggambarkan kekayaan terbesar dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Rp. 87,939 Miliar dan urutan kedua Bank Muamalat Indonesia Rp. 61,696 Miliar dan ketiga BNI Syariah sebesar Rp. 34.822 Miliar sementara PT. Bank Maybank Syariah asetnya paling kecil yaitu sebesar Rp. 1,275 Miliar.

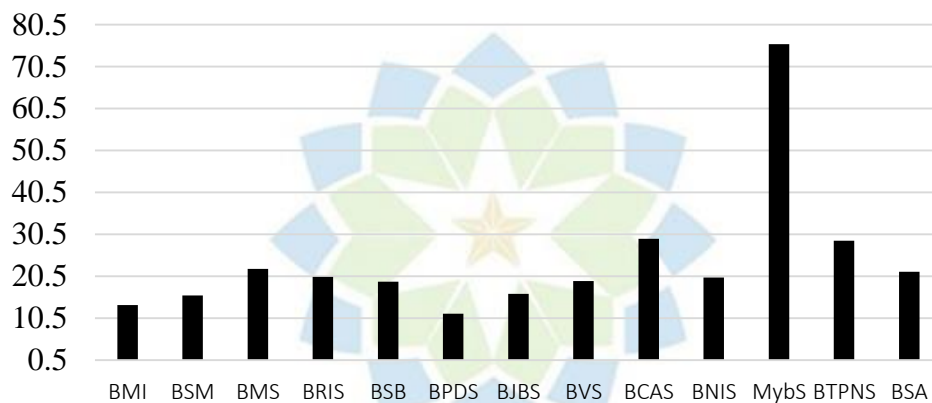
Grafik 2
Aset Bank Umum Syariah Tahun 2017



Yang lebih menarik dari sisi kecukupan modal yaitu meskipun Bank Muamalat Indonesia termasuk bank yang memiliki aset besar, tetapi rasio

kecukupan modalnya sebesar 13.62% kedua terkecil setelah PT. Bank Panin Dubai Syariah yaitu sekitar 11,51% bila dibandingkan dengan Maybank Syariah yang nilai asetnya paling kecil justru rasio kecukupan modalnya jauh di atas PT Bank Muamalat Indonesia yaitu sekitar 75,83%. Namun meskipun nilai kecukupan modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia kecil tetapi masih di atas batas minimum Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) yang ditentukan oleh OJK yaitu sebesar 10%-11%.

Grafik 3
Rasio Kecukupan Modal (CAR)



Kondisi kinerja keuangan yang belum merata ini menjadi jawaban sementara kenapa perbankan syariah nilainya (*market share*) masih berada dikisaran 5% jauh di bawah perbankan nasional. Sebagai sebuah industri seharusnya perbankan syariah secara keseluruhan harus mampu bersaing dengan perbankan konvensional, belum lagi mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim, hal ini tentunya menjadi modal bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Sebagai lembaga pengelola keuangan, Bank (konvensional atau syariah) harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat, salah satu bentuk untuk menjaga kepercayaan tersebut yaitu dengan diterbitkannya *annual report* bank secara konsisten dan berkesinambungan, oleh karena itu, Bank diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan secara periodik

berupa laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan.¹¹ *Financial report* merupakan media pertanggungjawaban manajemen kepada para *stakeholders* perusahaan, baik tidaknya kinerja perusahaan terlihat dalam laporan keuangan.

Financial report menurut Kasmir yakni laporan yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat sekarang atau dalam suatu periode tertentu.¹² Fungsi *financial report* yaitu sebagai media untuk menginformasikan tentang keadaan *financial* perusahaan dan prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh entitas bisnis yang bersangkutan.¹³ *Financial report* bank menggambarkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Laporan tersebut mendeskripsikan keadaan bank yang sesungguhnya, baik kekuatan atau kelemahan yang dimiliki oleh bank tersebut. Manfaat laporan keuangan bagi pihak internal yaitu manajemen dapat memperbaiki kelemahan dan mempertahankan serta meningkatkan kekuatan manajerialnya.¹⁴ Sedangkan bagi pihak eksternal *financial report* berfungsi sebagai media informasi yang fundamental untuk menilai kemampuan perusahaan dan untuk mengambil suatu keputusan.¹⁵ Laporan keuangan menurut Sutrisno merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yaitu (1) Neraca, dan (2) Laporan Laba-Rugi. Sementara menurut Reimers laporan keuangan merupakan kegiatan yang menyediakan dan menyajikan informasi keuangan. Informasi laporan keuangan tersebut setidaknya memuat empat laporan yaitu: 1) laba rugi, 2) perubahan ekuitas, 3) posisi keuangan dan 4) arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.¹⁶ Tujuan dari disusunnya laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*) sebagai acuan untuk melakukan evaluasi dalam mengambil suatu keputusan. Pihak-pihak

¹¹ Yuliati Y. Makaombohe, dkk., "Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011", *Jurnal EMBA*, 2: 1 (Maret 2014), 657

¹² Kasmir, "*Analisis laporan Keuangan*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 6

¹³ I. Fahmi, "*Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan menganalisis dari Aspek Keuangan*", (Bandung: Alfabeta, 2014), 22

¹⁴ Kasmir, "*Manajemen Perbankan*", 280

¹⁵ Khaerul Umam, "*Manajemen Perbankan Syariah*", 332

¹⁶ Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarak, "*Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoritis dan Empiris*", (Jakarta: KENCANA, 2017), 31

yang mempunyai kepentingan tersebut diantaranya manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah.¹⁷ Oleh karena itu supaya laporan tersebut bermanfaat bagi para penggunanya maka kualitas laporan keuangan harus diperhatikan.

Diantara komponen-komponen laporan keuangan yang sangat diperhatikan para investor adalah adanya informasi keuntungan yang dicatat dalam laporan laba rugi (*statement of income*) perusahaan. Laporan laba yang diinformasikan suatu entitas bisnis dalam hal ini bank syariah bermanfaat bagi pihak manajerial ataupun principal, karena dengan adanya informasi laba dalam sebuah *annual report* perusahaan memudahkan bagi para investor maupun calon investor untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas bisnis. Informasi laba dalam *annual report* perusahaan bertujuan untuk: 1), mengevaluasi kemampuan manajemen, 2), membantu memperhitungkan kemampuan keuntungan yang representatif dalam jangka panjang, dan 3), memperkirakan bahaya investasi atau meminjamkan dana. Untuk mengetahui kualitas kinerja manajemen perusahaan dapat dilakukan dengan cara melihat dan mengevaluasi kuantitas laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga dengan langkah tersebut diharapkan mampu memprediksi *return* yang diperoleh investor atas dana yang diinvestasikannya di suatu perusahaan.

Informasi laba dalam sebuah laporan keuangan dapat mempengaruhi sikap para pemakai informasi laporan keuangan yaitu *stakeholders*, terutama bagi pihak investor dan kreditor, keduanya membutuhkan informasi laporan keuangan tersebut sebagai landasan dalam pengambilan suatu sikap tentang pengembalian modal yang diinvestasikannya. Informasi laba juga dibutuhkan oleh seorang manajer untuk menghitung efisiensi pengelolaan, media untuk memperkirakan kondisi bisnis dan distribusi deviden di waktu yang akan datang, mengevaluasi kesuksesan manajemen, serta berfungsi sebagai landasan untuk mengambil sebuah keputusan ekonomis di periode selanjutnya.¹⁸

Perbedaan antara investor dan kreditor dengan manajer adalah dari sisi kemampuan memperoleh informasi laporan keuangan, manajer sebagai pelaksana operasional perusahaan lebih tahu kondisi perusahaan secara internal beserta

¹⁷ Sutrisno, "*Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*", (Yogyakarta: Ekonisia, 2017), 8-9

¹⁸ Indah Muliastari dan Dalili Dianati, "Manajemen Laba dalam Sudut Pandang Etika Bisnis Islam", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2: 2 (2014), 157-158

prospeknya di waktu yang akan datang sementara investor dan kreditor mereka mendapatkan informasi keuangan perusahaan dari angka-angka yang dilaporkan oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan sebagai media penghubung antara manajemen dan pihak principal tidak akan tercapai secara maksimal apabila pihak pengelola mengutak-atik angka-angka akuntansi yang dilaporkannya. Manajer yang bertanggungjawab mengoperasikan perusahaan terkadang mempunyai motivasi yang tidak sejalan dengan para *stakeholder*. Manajemen sebagai pengelola perusahaan akan seoptimal mungkin memaksimalkan laba perusahaan, hal demikian mungkin saja terjadi sebab manajemen mendapatkan informasi lebih yang tidak dipunyai oleh *stakeholders* (pemilik perusahaan).¹⁹ Pemaksimalan laba yang dilakukan oleh manajer bertujuan untuk melihatkan prestasi-prestasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba.

Pemaksimalan laba erat kaitannya dengan kepentingan politik manajer dalam menjaga kepercayaan dari para investor, dan mempertahankan posisinya di suatu perusahaan tersebut, karena sebagai pengelola, manajer bertanggung jawab terhadap baik-buruknya kinerja perusahaan yang dikelolanya, sehingga dengan kepentingannya tersebut seorang manajer berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan perusahaannya. Indikator kesejahteraan perusahaan dapat dicapai dengan baiknya kualitas laba yang diperoleh perusahaan, selain itu para investor dalam mengambil keputusan baik tidaknya suatu perusahaan yaitu dari kualitas laba yang dihasilkan perusahaan itu. Oleh sebab itu manajemen menyadari pentingnya kualitas laba pada perusahaan yang dikelolanya sehingga manajemen cenderung untuk melakukan praktik manajemen laba.²⁰

Didalam akuntansi berbasis syariah, estimasi laba-rugi merupakan laporan yang dijadikan alat ukur untuk menghitung kesuksesan operasional perusahaan untuk satu periode tertentu. Pelaporan keuangan dan sistem akuntansi syariah

¹⁹ Santhi Yuliana Sosiawan, "Pengaruh Kompensasi, Leverage, Ukuran Perusahaan, Earnings Power Terhadap Manajemen Laba", *JRAK*, Vol. 8 No. 1 (Februari 2012), 80

²⁰ Herawati Nurciptaning Arum, et. Al., "Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Nilai Perusahaan Terhadap Praktik Perataan Laba", *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9:2 (2017), 72

dibentuk sesuai dengan konsep bisnis Islam yang berlandaskan *al-Quran* dan *al-Hadits*. Seperti firman Allah Swt dalam *Al-Quran*, diantaranya:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Q.S. al-Bayyinah (98): 5)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-An’am (6): 165)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. al-Baqarah (2): 188)

Dalam ayat tersebut dijelaskan pentingnya mengaplikasikan kejujuran dalam bermuamalah, sehingga para *stakeholders* yang mempunyai kepentingan pada perusahaan tersebut tidak merasa dirugikan, termasuk dalam pembuatan laporan keuangan, meskipun terjadi motivasi berbeda antara *principal* dengan manajer dalam hal penyerapan informasi laporan keuangan. Karena tujuan manajemen keuangan Islam yaitu pertanggungjawaban (*accountability*) kepada semua pihak untuk menciptakan rasa keadilan dan keseimbangan supaya terhindar dari perilaku merugikan diri sendiri dan pihak lain. Artinya seseorang tidak

diperbolehkan mengambil hak atau milik kelompok lain dengan jalan bathil, semua perilaku bisnis harus dijalankan dengan prinsip saling ridho satu sama lain, termasuk dalam pembuatan laporan keuangan, pengelola perusahaan tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merubah atau melakukan kebijakan akuntansi tertentu karena dasar kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam membuat laporan keuangannya harus sejalan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dimana secara yuridis, teoritis dan praktisnya laporan keuangan itu dapat diterima oleh berbagai pihak tanpa memprioritaskan kepentingan sendiri. Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) atau *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) merupakan landasan pembuatan laporan keuangan yang meliputi standar akuntansi dan literatur-literatur lainnya yang didukung atas berlakunya aplikasi akuntansi secara yuridis, teoritis dan praktis. Sehingga PABU disebut sebagai aturan dalam pelaporan keuangan. Tujuan dibentuknya Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) yakni untuk menciptakan keseragaman proses dan hasil laporan keuangan entitas perusahaan di suatu Negara, dan juga untuk mempermudah pengukuran tingkat keterbandingan (*comparability*) antara laporan keuangan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Sehingga dengan diterapkannya aturan tersebut proses pengawasan atas kewajaran suatu laporan dapat mudah dilakukan.

Penerapan PABU dalam suatu perusahaan diharapkan mampu menghasilkan produk *financial report* yang baik. Untuk menentukan laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa indikator pokok laporan keuangan yang dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2002), yaitu bahwa *annual report* yang dibuat oleh entitas perusahaan mudah untuk dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Secara teoritis, PABU memang mampu memberikan garansi atas kualitas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Tetapi secara praktis, Standar Akuntansi (yang merupakan bagian dari PABU) memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menjadikan laporan keuangan menjadi kurang andal (*reliable*) Keterbatasan standar akuntansi pada laporan keuangan ini, dapat memicu terjadinya praktik manajemen laba oleh pengelola

perusahaan terhadap laporan keuangannya. Menurut Marzuqi, Manajemen laba adalah suatu kebijakan atau perilaku yang dimaksudkan untuk memaksimalkan *utilitas* manajer dan mengarah pada bagaimana cara mendapatkan keuntungan sepihak dalam hal ini manajer perusahaan dengan cara mengintervensi proses pelaporan keuangan.²¹

Menurut Sulistyanto, manajemen laba seakan menjadi tradisi perusahaan (*corporate culture*) yang dilakukan semua entitas bisnis di dunia. Efek yang diakibatkan dari kegiatan perekayasaannya tersebut dapat menyebabkan hancurnya konstelasi ekonomi, dan juga konstelasi akhlak. karenanya, tidak heran apabila kepercayaan masyarakat menurun terhadap para pelaku bisnis dalam hal ini pengelola keuangan yang tidak mengindahkan akhlak dan tanggung jawab, sebab bisnis harus dijalankan sesuai dengan aturan yang bersih dan sehat.²² Prinsip dalam berbisnis harus mengedepankan etika dan moral sehingga suasana yang bersih, sehat dan kondusif terjaga sebaik mungkin dan tidak ada seseorang yang merasa dirugikan dalam aktivitas bisnisnya. Terlebih pada perusahaan yang mengelola keuangan seperti bank konvensional atau yang berlandaskan syari'ah, praktik etika dalam dunia bisnis bertujuan untuk menjaga nilai-nilai tentang kebaikan, keburukan, kebenaran dan kesalahan dalam dunia bisnis yang berlandaskan prinsip moralitas.²³

Secara umum manajemen laba yang didefinisikan oleh Sulistyanto, merupakan intervensi pengelola perusahaan untuk mempengaruhi informasi-informasi laporan keuangan dengan maksud mengelabui *stakeholder* yang ingin tahu kapasitas dan keadaan perusahaan.²⁴ Dan juga Schipper menjelaskan manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam pembuatan pelaporan keuangan untuk kepentingan kelompok luar dengan harapan memperoleh

²¹ Ahmad Y. Marzuqi dan Achmad B. Latif, "Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 7:1 (2010), 2

²² Sri Sulistyanto, "*Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*", (Jakarta: Grasindo, 2008), 1-2.

²³ Ahmad Y. Marzuqi dan Achmad B. Latif, "Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", 4

²⁴ Sri Sulistyanto, "*Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*", 4-6.

keuntungan untuk pribadinya.²⁵ Begitu pula menurut Healy dan Wahlen, terjadinya manajemen laba manakala para pengelola (manajer) menggunakan asumsi mereka dalam membuat laporan keuangan serta mengubah alur transaksi dengan tujuan untuk merubah laporan keuangan sehingga menyebabkan *stakeholder* terkecoh dalam menerima laporan kinerja perusahaan.²⁶

Intervensi manajer itu muncul karena ada celah untuk melakukan hal tersebut, diantaranya dalam laporan keuangan yang dijelaskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia melalui PSAK revisi 1998 nomor 1 paragraph 19 bahwa setiap entitas bisnis wajib membuat *financial report* berdasarkan akrual adapun pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil memakai dasar kas. Melalui *accrual basic*, efek transaksi juga kejadian yang lain dicatat pada waktu transaksi dilakukan (bukan berdasarkan ketika kas ataupun setara kas diterima atau dibayar) dan dilaporkan pada saat yang bersangkutan.²⁷ Penyajian laporan keuangan dengan dasar akrual dimaksudkan untuk menyajikan informasi transaksi sebelumnya dan kejadian lainnya yang bermanfaat untuk *stakeholder* dalam menyimpulkan suatu keputusan. Penerapan dasar akrual ini dipertegas oleh fatwa Dewan Syariah Indonesia yaitu mengenai prinsip distribusi hasil usaha sebaiknya menggunakan system accrual basis tujuannya yaitu untuk menciptakan kemaslahatan pencatatan laporan keuangan.²⁸ Padahal menurut Astri Faradila dalam penelitiannya menyebutkan bahwa prinsip dasar akrual (akrual kelolaan atau akrual diskresioner) selama ini sering dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen laba.²⁹

Manajemen laba dipraktikan dengan cara memainkan unsur-unsur akrual dalam sebuah laporan keuangan, unsur akrual yaitu item yang tidak membutuhkan data kas secara fisik sehingga perusahaan dengan mudah dapat memainkan kecil-besarnya komponen akrual karena memperlmainkan akrual tidak mesti disertai

²⁵ Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarak, "Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoritis dan Empiris", 43

²⁶ Ahmad Y. Marzuqi dan Achmad B. Latif, "Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", 6

²⁷ Sofyan Safri Harahap, et. al., "Akuntansi Perbankan Syariah", 53

²⁸ Sofyan Safri Harahap, et. al., "Akuntansi Perbankan Syariah", 55

²⁹ Astri Faradila dan Ari Dewi Cahyati, "Analisis Manajemen Laba", 58

depan penerimaan ataupun pengeluaran kas perusahaan.³⁰ Akrua diskresioner yaitu unsur akrual hasil dari kegiatan manajemen dalam memanfaatkan kebebasan menetapkan perhitungan dan menerapkan standar akuntansi seperti penetapan perhitungan persentase jumlah piutang tak tertagih, pemilihan metode penyusunan aktiva tetap, dan lain-lain.³¹ Oleh karena itu, menurut Wild, *et al.* (2003), konsep akrual ini membawa kelemahan dalam pelaporan keuangan karena konsep akrual adalah konsep akuntansi yang tidak sempurna sebab akuntansi akrual merupakan akuntansi yang rumit terlebih transaksi bisnis modern ini semakin kompleks dan akuntansi akrual ini dapat membuka ruang untuk tindakan-tindakan manipulasi. Pengaburan laporan keuangan berbasis akrual ini memberikan kesempatan bagi para manajer yang oportunis untuk melakukan pelaporan sesuai dengan kepentingan dirinya karena pelaporan berbasis akrual tidak mewajibkan manajer untuk mempertanggungjawabkan aliran kas sesuai dengan laba yang dilaporkan, artinya pihak manajemen dengan mengedepankan kepentingannya mempunyai peluang untuk melakukan praktik manajemen laba.³² Djakman (2013) menjelaskan bahwa *earning management* yang dilakukan dengan cara manajemen berbasis akrual tidak bisa disamakan dengan *earning manipulation*. *Earning management* dipraktikkan berdasarkan kepentingan pengelola yang menggunakan kelemahan *inherent* dari peraturan akuntansi berbasis akrual dan pada prinsipnya masih sesuai dengan standar akuntansi berterima umum, berbeda dengan manipulasi laba *earning manipulation* bahwa manipulasi ini dilakukan berdasarkan kepentingan manajer dengan cara melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum.³³

Schroeder dan Clark (1998) berpandangan meskipun manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen bukan merupakan suatu kecurangan (*fraud*) karena dilakukan atas dasar kebijakan manajerial yang sehat (memilih metode akuntansi

³⁰ Sri Sulistyanto, "Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris", 161

³¹ Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarak, "Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoritis dan Empiris", 34

³² Akhmad Riduwan, "Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba: Studi Hermeneutika", 2

³³ Marzuqi dan Latif, "Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 7:1 (Maret 2010), 8

sesuai dengan standar akuntansi) tetap saja praktik manajemen laba ini dapat mempengaruhi keputusan *stakeholders*.³⁴ Dari penjelasan tersebut dapat digeneralisir bahwa *earning management* yaitu perilaku pengelola perusahaan dalam membuat *financial report* dengan menggunakan metode akuntansi tertentu yang tujuannya untuk mencapai kepentingan pribadi dengan mengesampingkan kepentingan pihak lain, sehingga mengganggu para *stakeholders* yang mempercayai laporan keuangan tersebut. Tindakan manajemen laba tersebut berimplikasi pada turunnya kredibilitas manajemen karena melakukan hal-hal yang tidak etis.

Manajemen laba muncul karena terdapat dualisme kepentingan yaitu pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*), hubungan antara *principal* dan manajer dijelaskan dalam teori keagenan. Teori keagenan yaitu kekuasaan yang ditugaskan pada manajer untuk membuat suatu kebijakan berdasarkan kepentingan pemilik.³⁵ Konsep keagenan merupakan pengorbanan yang lahir dari kolerasi keagenan apapun, termasuk kolerasi dalam kontrak kerja diantara *principal* dan manajer perusahaan.³⁶ Eisenhardt mengemukakan bahwa teori agensi menggunakan tiga sifat manusia, diantaranya:³⁷

- 1) Secara umum manusia selalu memprioritaskan diri pribadi (*self interest*),
- 2) Manusia mempunyai keterbatasan tentang masa yang akan datang (*bounded rationality*)
- 3) Manusia berusaha untuk menjauhi bahaya (*risk averse*).

Atas dasar sifatnya tersebut manusia dalam hal ini manajer, sebagai manusia dia akan bertindak oportunistik yaitu memprioritaskan kepentingan dirinya sendiri. Motivasi pendorong bagi seorang manajer berperilaku oportunistik tergambar pada asumsi pada konsep akuntansi positif (*positive accounting theory*), yaitu 1) *bonus plan hypothesis* bahwa pihak *principal* menjanjikan pihak pengelola akan mendapatkan sejumlah bonus apabila kinerja perusahaan

³⁴ Marzuqi dan Latif, "Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", 8

³⁵ Yoyo Sudaryo, et. al., "Keuangan di Era Otonomi Daerah", (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017), 61

³⁶ Sri Sulistyanto, "Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris", 119

³⁷ Kathleen M. Eisenhardt, "Agency Theory: An Assessment. Academy of Management Review". *Academy of Management*, 14:1, (1989), 57-74

mencapai nominal tertentu. 2) *debt covenant hypothesis*, hipotesis yang kedua dalam mengelola dan mengatur laba perusahaan akan cenderung menunda pembayaran kewajiban utang yang sudah jatuh tempo pada tahun tertentu untuk diselesaikan pada tahun yang akan datang, dan 3) *political cost hypothesis* terjadinya manajemen laba disebabkan misalnya adanya peraturan pemerintah dalam penetapan pajak yang tinggi.

Perseteruan agensi timbul manakala manajer memiliki tanggungjawab mensejahterakan investor secara maksimum, di sisi lain seorang manajer memiliki motivasi untuk mendapatkan kesejahteraan pribadi. Dua motivasi itu yang menjadi dasar terjadinya konflik atau masalah keagenan (*agency problem*). Perilaku manajemen laba tidak bisa dipisahkan dengan konsep keagenan, konsep tersebut mengungkapkan berbagai kepentingan masing-masing antara principal dan agen, untuk mencapai kesejahteraannya principal harus melakukan perjanjian kerjasama dengan para agen sebagai pengelola guna mendapatkan profit yang maksimal caranya perusahaan tersebut harus mampu terus meningkatkan profitabilitas perusahaannya, sementara agen juga mempunyai misi pribadi untuk mensejahterakan dirinya, cara memaksimumkan kesejahteraannya yaitu melalui meminimumkan biaya-biaya keagenan yang muncul dari pengawasan dan penyelenggaraan kontrak.³⁸

Konsep *corporate governance* (tata kelola perusahaan) bisa dipahami dengan teori keagenan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001; dalam Naja, 2007 dan Eva 2016) mendefinisikan *corporate governance* yakni regulasi yang menetapkan kolerasi antara investor, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta *stakeholder* lainnya (internal maupun eksternal) yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya. *Corporate governance* yakni system untuk mengatur suatu perusahaan.³⁹ Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berfokus pada pengendalian aktivitas perusahaan dengan cara mengukur kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan pada para

³⁸ Indra Bastian, "Akuntansi Pendidikan", (Jakarta: Erlangga, 2006), 213

³⁹ Eva Rosa Dewi S, dan Moh. Khoiruddin, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Masuk Dalam JII (Jakarta Islamic Index) Tahun 2012-2013", *Management Analysis Journal* 5:3 (2016), 157

pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga perusahaan mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan memenuhi asas keterbukaan dan tanggungjawab perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bagian dari implementasi etika bisnis, dimana fungsinya yaitu untuk mengarahkan serta mengendalikan suatu perusahaan supaya melahirkan nilai tambah (*value added*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁰ Nilai tambah yang dimaksud yaitu *corporate governance* memberikan jaminan kepada para investor untuk memperoleh kembali investasinya yang logis dan bernilai tinggi.

Perilaku bisnis menurut pandangan Hill dan Jones (1998) dalam Wulandari (2015), yaitu suatu ajaran yang berfungsi untuk memisahkan antara yang salah dan yang benar bertujuan untuk membekali setiap pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan strategis yang terkait dengan kompleksitas masalah.⁴¹ Penerapan etika bisnis di perusahaan mampu menciptakan *value* dan perilaku *employees* dan *leader* dalam rangka menciptakan kolerasi yang seimbang dan sehat dengan para konsumen, investor dan lebih luas dengan masyarakat. Setiap individu maupun entitas bisnis menyadari bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang berlandaskan etika, semua aktivitas usaha yang diaplikasikan sejalan dengan kode etik etika dan hukum serta regulasi yang berlaku. Setiap perusahaan tidak seharusnya memusatkan perhatian kerjanya pada pemaksimalan *profit* belaka, meskipun perusahaan itu mempunyai tanggungjawab pada para investor untuk dapat memberikan keuntungan kepada mereka, tetapi perusahaan harus mampu menyusun strategi bisnis perusahaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, profitabilitas perusahaan dapat meningkat juga nilai-nilai norma bisnisnya tidak sampai terabaikan. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara *principal* dan agen bisa diminimalisir dengan dipraktikannya bisnis sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

⁴⁰ Eva Rosa Dewi S. dan Moh. Khoiruddin, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Masuk Dalam JII (Jakarta Islamic Index) Tahun 2012-2013", 157.

⁴¹ Siswi Wulandari, "*Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Etika Bisnis", *Journal Applied Business and Economics*, 1:3 (Maret 2015), 184.

Etika bisnis dalam Islam senantiasa menjaga prinsip-prinsip etika, tanggung jawab dan akuntabilitas sehingga perusahaan dalam melakukan pelaporannya tidak melakukan hal-hal yang melanggar prinsip syariah. Etika bisnis Islam adalah suatu aktivitas bisnis yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan dan keuntungannya baik berupa barang maupun jasa, tetapi dibatasi dari cara memiliki dan mempergunakannya dengan aturan halal dan haram.⁴² Dalam hal ini sebuah perusahaan dalam membuat laporan keuangan harus sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi dan dibuat berlandaskan kejujuran, transparansi, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*), sehingga apabila perusahaan diketahui melakukan praktik-praktik diluar etika bisnis seperti melakukan perekayasaan laporan keuangan, maka dengan sendirinya kepercayaan itu akan hilang dan menyebabkan keluarnya para investor. Keluarnya para investor tersebut menjadi hal yang merugikan bagi bank dan bahkan keadaan bank bisa sampai bangkrut (*collapse*). Oleh sebab itu, Bank Indonesia sebagai regulator lembaga keuangan perbankan secara serius mengembangkan peraturan-peraturan yang terkait dengan etika bisnis yang harus diaplikasikan oleh lembaga keuangan perbankan yaitu dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, antara lain: dibentuknya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) tahun 2004; Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2009; dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, semua keputusan itu bertujuan untuk menciptakan sistem bisnis perbankan yang sehat, kuat, efisien dan transparan.⁴³

Penerapan prinsip etika bisnis Islam sangat penting bagi entitas bisnis termasuk entitas bisnis syariah dalam paradigma ini yaitu bank syariah, penerapan etika bisnis Islam diimplementasikan melalui regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) guna mengendalikan manajemen sebaik mungkin.

⁴² Ahmad Yusuf dan Achmad Badarudin, *Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*, 5.

⁴³ Maya Indriastuti, "Analisis Kualitas Auditor dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba", *Jurnal Eksistensi IV:2* (Agustus 2012), 532

Elemen yang ada dalam prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).⁴⁴ Keempat elemen tersebut harus sejalan dengan prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu terciptanya nilai kejujuran, kemaslahatan dan keadilan bagi semua *stakeholders*.

Fenomena manajemen laba sering diteliti oleh para peneliti sebelumnya, beberapa penelitian itu pernah dilakukan oleh: Santhi Yuliana Sosiawan (2017), menurutnya adanya pemisahan fungsi antara principal dan agen memicu terjadinya konflik kepentingan sehingga terjadi asimetri informasi karena manajer dituntut untuk mengelola perusahaan supaya mendapatkan laba yang sesuai dengan harapan principal maka manajer berinisiatif untuk melakukan pengelolaan laba yang disebut manajemen laba, untuk mengungkap perilaku manajemen laba dalam penelitiannya dilakukan perhitungan-perhitungan rasio keuangan. Rasio yang digunakan dalam mengungkap praktik manajemen laba menggunakan rasio ukuran perusahaan, *earnings power*, *leverage* dan kompensasi. Kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa rasio *leverage* dan *earnings power* perusahaan dapat mempengaruhi akan praktik manajemen laba.⁴⁵ Penelitian serupa juga dilakukan oleh Budi S. Purnomo dan Puji Pratiwi (2009), penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan laba (*earning power/profitabilitas*) berpotensi untuk melakukan modifikasi laba baik dengan cara *income increasing accrual* ataupun *income decreasing accrual* laba.⁴⁶ Kedua peneliti di atas memberi kesimpulan yang hampir sama dimana manajemen laba dapat dipengaruhi oleh variabel *leverage* dan profitabilitas.

Indah Muliasari dan Dalili Dianati (2014), penelitiannya menyatakan bahwa manajemen memiliki makna luhur seperti merencanakan, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan berubah konotasinya menjadi mengatur,

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Surat Edaran OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum", (Jakarta: OJK, 2016), 5.

⁴⁵ Santhi Y. Sosiawan, "Pengaruh Kompensasi, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Earnings Power* Terhadap Manajemen Laba, 79

⁴⁶ Budi S. Purnomo dan Puji Pratiwi, "Pengaruh *Earning Power* Terhadap Praktek Manajemen Laba (*earning Management*)", *Jurnal Media Ekonomi*, 14: 1 (, 2009), 12

mengubah, memperlmainkan dan memanipulasi ketika manajemen tersebut melakukan praktik manajemen laba. Karena dalam tinjauan etika bisnis Islam praktik tersebut dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran syariah, karena prinsip bisnis yang sesuai syariah menyatakan bahwa seluruh aktivitas bisnis harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang terkandung dalam *al-Quran* dan *al-Hadits*.⁴⁷

Dalam dunia perbankan syariah penelitian untuk mengungkap adanya praktek manajemen laba telah dilakukan yaitu oleh Sri Padmantlyo (2010), hasil penelitiannya menyatakan bahwa dengan menggunakan proksi total akrual terbukti bahwa manajemen laba dipraktikan oleh bank syariah dengan jalan menaikkan laba total akrualnya baik notasinya positif maupun negatif.⁴⁸ Penelitian lain tentang manajemen laba ditinjau dari nilai-nilai etika bisnis Islam dilakukan juga oleh Abdullah dan Nurul Ainun (2017), hasil analisisnya mengungkapkan bahwa pengelolaan manajemen laba harus berorientasi pada spirit ekonomi Islam sehingga manajemen laba efisien yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dengan menggunakan variabel Proksi Manajemen Laba (PML) serta Profitabilitas Masa Depan (PMD) diketahui bahwa bank syariah yang melakukan manajemen laba efisien telah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam karena telah menerapkan prinsip kemashlahatan, kejujuran dan keadilan.⁴⁹ Penelitian lain tentang pengungkapan penerapan etika bisnis Islam di perbankan syariah dilakukan oleh Haniffa dan Hudaib (2007), tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara identitas etika Islam yang dilaporkan bank syariah di kawasan Teluk Arab dalam *annual report* dengan identitas etika Islam yang ideal dengan menggunakan formulasi *Ethical Identity Index* (EII), hasil penelitiannya menggambarkan bahwa bank syariah dalam mengungkapkan

⁴⁷ Indah Muliasari dan Dalili Dianati, "Manajemen Laba dalam Sudut Pandang Etika Bisnis Islam", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2:2 (2014), 179

⁴⁸ Sri Padmantlyo, "Analisis Manajemen Laba Pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia)", *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 14: 2 (2010), 65

⁴⁹ M. Wahyudin Abdullah dan Nurul Ainun, "Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Manajemen Laba Efisien Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum* 17:1, (Juni 2017), 65.

etika bisnis Islam berbeda-beda dalam pengungkapan etika yang dikomunikasikan dengan identitas Islam yang ideal.⁵⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel pendorong bagi pihak pengelola untuk melakukan praktik manajemen laba. Variabel pendorong yang dimaksud yaitu *leverage*, profitabilitas dan *ethical identity index*. *Leverage* menurut Susan Irawati, merupakan suatu aturan yang dipraktikkan oleh satu entitas bisnis dalam menyimpan investasi atau mendapatkan sumber dana yang dibarengi dengan konsekuensi beban/biaya tetap yang dibebankan pada perusahaan.⁵¹ *Leverage* merupakan variabel yang berfungsi untuk menghitung prosentase perusahaan yang dibiayai dari utang.⁵² Utang merupakan dana eksternal yang didapatkan perusahaan yang berkonsekuensi menjadi sebuah kewajiban (*liabilities*) bagi perusahaan tersebut.⁵³ Bagi setiap perusahaan modal sangat dibutuhkan untuk memenuhi semua atau sebagian biaya jangka pendek atau jangka panjang, selain itu adanya modal perusahaan mampu melakukan ekspansi untuk berinvestasi pada usaha lainnya. Risiko bisnis suatu perusahaan dapat dikendalikan oleh variabel *leverage*. Ketika rasio *leverage* meningkat maka tingkat pengembalian (*return*) dan risiko perusahaan pun akan meningkat, atau sebaliknya ketika *leverage* perusahaan menurun, maka tingkat pengembalian dan risiko perusahaan pun akan menurun pula. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akan cenderung melakukan tindakan manajemen laba tujuannya untuk menarik kreditur.⁵⁴

Variabel pendorong lainnya yaitu rasio keuntungan yaitu proksi yang dipakai mengestimasi efisiensi pemakaian harta perusahaan atau kapabilitas perusahaan untuk mendatangkan keuntungan pada waktu tertentu dan rasio ini dinamakan profitabilitas atau rentabilitas.⁵⁵ Rentabilitas ekonomi yaitu selisih dari

⁵⁰ Haniffa dan Hudaib, "Exploring the Ethical Identity of Islamic Bank via Communication in Annual Reports." *Journal of Business Ethics* 76:1 (2007), 97-116

⁵¹ Susan Irawati, "*Manajemen Keuangan*", (Bandung: Pustaka, 2006), 172

⁵² I. Fahmi, "*Analisis Kinerja Keuangan*", 62

⁵³ Irham Fahmi, "*Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*", (Bandung: Alfabeta, 2016), 160

⁵⁴ Santhi Y. Sosiawan, "Pengaruh Kompensasi, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Earnings Power* Terhadap Manajemen Laba", 80

⁵⁵ Susan Irawati, "*Manajemen Keuangan*", 58

laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipakai untuk mendatangkan keuntungan dan dinyatakan dalam prosentase.⁵⁶ Profitabilitas digunakan sebagai alat untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mendatangkan suatu laba. Jika keadaan rasio profitabilitas berada dalam level yang baik, maka semakin baik pula perusahaan dalam mendeskripsikan kapabilitas tingginya perolehan keuntungan.⁵⁷ Profitabilitas merupakan dasar mengenai kapabilitas suatu perusahaan dalam mendatangkan laba bagi perusahaan tersebut yang kemudian dijadikan media oleh *stockholder* untuk mengambil suatu keputusan. Oleh sebab itu, karena pentingnya rasio profitabilitas ini bagi para *stakeholder*, maka para pengelola perusahaan berupaya untuk menginformasikan perusahaan sebaik mungkin khususnya dalam menginformasikan perolehan laba dan keadaan yang demikian itu dapat membuka ruang bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Variabel untuk meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba adalah nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prinsip etika bisnis Islam karena tujuan dari ekonomi Islam adalah terciptanya kejujuran, keadilan dan kemaslahatan. Pengelolaan perusahaan syariah harus dilandasi oleh spirit ekonomi Islam tersebut, sehingga pihak perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya harus sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati oleh semua pihak. Spirit ekonomi Islam yang menjalankan prinsip kejujuran, keadilan dan kemaslahatan menjadi acuan utama bagi pihak manajer sebagai pengelola perusahaan termasuk pada bank syariah. Sehingga laporan kinerja perusahaan harus dibuat sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan tanpa memprioritaskan kepentingan satu pihak. Bila mana manajemen perusahaan melakukan laporan dengan kebijakan atas kepentingan pribadi maka perusahaan tersebut mempraktikan manajemen laba. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana prinsip etika bisnis Islam dapat mengendalikan perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba dan apakah perusahaan yang melakukan manajemen laba sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang mengedepankan prinsip kejujuran, kemaslahatan dan

⁵⁶ Bambang Riyanto, "Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan", 36

⁵⁷ Irham Fahmi, "Analisis Kinerja Keuangan", 80

keadilan. Penelitian mengenai pengungkapan identitas etika Islam penting untuk dilakukan, karena berdasarkan penelitian sebelumnya diungkapkan bahwa bank syariah terbukti melakukan praktik manajemen laba dalam laporan keuangannya. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan fenomena di atas, manajemen laba sangat menarik untuk diamati, karena ini berkaitan dengan etika, citra dan kinerja lembaga keuangan khususnya di Perbankan Syariah. Di mana bank syari'ah sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip syari'ah dilarang untuk melakukan perekayasa laporan keuangan, karena perlakuan tersebut akan menurunkan kualitas laporan keuangan, dan menurunkan kredibilitas manajemen perusahaan serta merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Berdasarkan hal itu, penelitian ini akan menganalisis apakah terjadi tindakan manajemen laba di bank umum syariah dengan cara mengkombinasikan variabel *leverage*, profitabilitas dan penerapan prinsip etika bisnis Islam yang diasumsikan dapat mendorong terjadinya tindakan manajemen laba di Bank Umum Syariah. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah Periode 2010-2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh variabel *leverage* terhadap manajemen laba di Bank Umum Syariah?.
2. Apakah terdapat pengaruh variabel profitabilitas terhadap manajemen laba di Bank Umum Syariah?.
3. Apakah terdapat pengaruh variabel Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap manajemen laba di Bank Umum Syariah?.

4. Apakah terdapat pengaruh variabel *leverage*, profitabilitas dan Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam secara simultan terhadap manajemen laba di Bank Umum Syariah?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

1. Signifikansi pengaruh variabel *leverage* terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah.
2. Signifikansi pengaruh variabel profitabilitas terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah.
3. Signifikansi pengaruh variabel Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah.
4. Signifikansi pengaruh variabel *leverage*, profitabilitas dan Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam secara simultan terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan bagi para akademisi ataupun bagi para praktisi:

1. Akademisi
Menjadi sarana untuk menambah wawasan tentang perbankan syariah yang berkaitan dengan manajemen laba yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perbankan dan juga sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
2. Praktisi
Menjadi bahan informasi dalam mengambil keputusan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi manajemen laba perusahaan lembaga keuangan syariah juga dapat menimbang tentang kesesuaian prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah.